

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2 0 1 9



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

Menyetip Anggaran Tim Gubernur

Dewan meminta TGUPP dibiayai dana operasional gubernur.

Inge Klara Safitri

Inge.klara@tempo.co.id

JAKARTA — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta akan mencoret Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) dari rancangan anggaran. Dalam Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2020, tertera Rp 19,8 miliar sebagai pembiayaan tim gubernur dalam pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).

Tim Gubernur terdiri atas 73 orang pilihan Gubernur Anies Baswedan. Dipimpin Amin Subekti, Direktur PLN 2014-2017, mereka menjadi penasihat gubernur, sekaligus menjembatani Gubernur dengan satuan kerja perangkat daerah.

"Kami merekomendasikan TGUPP memakai dana operasional gubernur," kata Mujiyono, Ketua Komisi Pemerintahan DPRD, kemarin. Menurut dia, tim bekerja dan bertanggung

jawab kepada gubernur, sehingga pembiayaannya tidak sepatutnya dibebankan ke anggaran daerah.

Politikus Partai Demokrat itu akan mendorong rekomendasi Komisi A tersebut ke Badan Anggaran, yang menggelar rapat pembahasan rancangan KUA-PPAS bulan ini. "Kami akan berjuang bersama di Banggar besar," ujar Mujiyono.

Komisi Pemerintahan, dia menambahkan, juga mempertanyakan alasan penempatan anggaran Tim Gubernur di Bappeda. "Secara tugas pokok dan instruksi, mereka bukan di Bappeda," kata dia.

Dewan Kebon Sirih akan merekomendasikan evaluasi tugas pokok dan fungsi Tim Gubernur. Sebab, jumlah anggota dan anggaran tim tersebut terus naik. "Namun kami tidak pernah mendapat laporan sebagai pertanggungjawaban atas APBD yang digunakan," kata Mujiyono.

Dalam rapat KUA-PPAS 2020 pekan lalu, Komisi A mempertanyakan anggaran Tim Gubernur yang selalu

naik. Mulai dari Rp 1 miliar pada 2017, pembiayaan untuk mereka naik menjadi Rp 16,2 miliar pada 2018, dan Rp 18,9 miliar di tahun ini. Bappeda sempat mengajukan Rp 26 miliar untuk Tim Gubernur dalam rancangan anggaran 2020, namun direvisi menjadi Rp 21 miliar, dan terakhir Rp 19,8 miliar.

Gembong Warsono, anggota Komisi Pemerintahan, mengatakan penghapusan anggaran Tim Gubernur dari APBD juga didasari asas keadilan. Saat ini, terjadi pengurangan usul anggaran dari Rp 95,9 triliun menjadi Rp 89 triliun karena efisiensi. "Tidak adil jika seluruh satuan kerja diminta melakukan efisiensi, namun TGUPP tetap memakai anggaran besar," ujar dia. "Setiap rupiah yang kita keluarkan harusnya mendapatkan *output* untuk pembangunan Jakarta."

Politikus PDI Perjuangan itu pun menyoroti efektivitas kerja tim yang bertajuk "Percepatan Pembangunan" tersebut. "Pak

Gubernur mendapatkan informasi dari 70 sekian orang, bukan tambah cepat, justru tambah lambat," kata Gembong.

Hingga laporan ini ditulis, pembiayaan Rp 19,8 miliar untuk Tim Gubernur masih tercatat di rancangan anggaran. "Di catatan saya masih ada," ujar Suharti, pelaksana tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, kemarin. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah DKI, Artal Reswan, mengatakan pemerintah DKI belum mendapat rekomendasi apa pun dari Dewan. ● IMAM HAMDI